

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH IBTIDAIYAH UNTUK
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
(STUDI KASUS)
DI MADRASAH IBTIDAIYAH KECAMATAN BOGOREJO KABUPATEN
BLORA**



T E S I S

Diajukan kepada
Program Pascasarjana UNWAHAS Semarang
untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar
Magister Pendidikan

Oleh:

MUSTAIN

NIM : A 1720073

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustain
NIM : A 1720073
Program : Magister
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Dengan nama Allah Yang Maha Kuasa, saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam karya ilmiah Tesis ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Saya menyatakan juga dengan penuh tanggung jawab bahwa karya ini bukan hasil jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan ilmiah yang sudah paten berstandar milik orang lain yang terdapat dalam Tesis ini dikutip dan diambil inti substansinya atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 26 Agustus 2020
Saya yang menyatakan,



Mustain
A 1720073

NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Wahid Hasyim
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, koreksi dan penilaian terhadap naskah Tesis berjudul :

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH IBTIDAIYAH UNTUK
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
(STUDI KASUS)
DI MADRASAH IBTIDAIYAH KECAMATAN BOGOREJO KABUPATEN
BLORA**

Yang ditulis oleh :
Nama : Mustain
NIM : A 1720073
Program : Magister
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Selanjutnya, saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim untuk diujikan/ disidangkan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Agustus 2020
Pembimbing


Dr. Ifada Retno Ekawingrum, S.Ag., M.Pd
NPP.



**YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang

PENGESAHAN TESIS




Proposal tesis dengan judul "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH IBTIDAIYAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS) DI MADRASAH IBTIDAIYAH KECAMATAN BOGOREJO KABUPATEN BLORA" atas nama Mustain (NIM: A 1720073), Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, telah diujikan pada tanggal :

September 2020

Dinyatakan layak sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam pada program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Semarang, September 2020

Tim Penguji :

1. **Dr. H. Aminudin Sanwar, MM**
Ketua/Penguji 
2. **Dr. Nanang Nurcholis, S.Th.I., MA**
Anggota/Penguji 
3. **Dr. Ifada Retno Ekaningrum, S.Ag., M.Pd**
Sekretaris/Pembimbing 

Mengesahkan,
Direktur

Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA
NPP. 01. 99. 0. 0003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al Insyirah 5-6)*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk :

- Istriku, yang selalu setia mendampingi
- Anak-anakku tersayang yang selalu memberikan inspirasi
- Rekan-rekan mahasiswa S2 kelompok Blora senasib sepenanggungan seperjuangan angkatan tahun 2018
- Almamater tercinta

ABSTRAK

MUSTAIN, 2020 : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH IBTIDAIYAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS) DI MADRASAH IBTIDAIYAH KECAMATAN BOGOREJO KABUPATEN BLORA, Pembimbing : Dr. Ifada Retno Ekaningrum, S.Ag., M.Pd

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora. 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana prasarana Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora. 3) Mendiskresikan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Tempat penelitian adalah Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Kecamatan Bogorejo Blora yakni MI Sirojul Huda dan MI Tarbiyatul Athfal. Fokus penelitian ini yakni partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Kecamatan Bogorejo Blora. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dengan pendukung dokumen. Validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data, member check, penyusunan data base, uji kredibilitas dan penyusunan bukti mata rantai penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian didapatkan bahwa : 1) Nuansa keterbukaan, saling percaya dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan program serta evaluasi program madrasah yang difasilitasi dan dijembatani oleh madrasah merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora sehingga dapat mewedahi aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menggalang dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. 2) Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangsih pemikiran dengan merencanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan madrasah, merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora. 3) Mutu pendidikan di MI Sirojul Huda dan MI Tarbiyatul Athfal dapat terwujud atas kerja sama yang baik antara pihak sekolah termasuk kepala sekolah dengan komite sekolah dan masyarakat dengan indikasi banyak torehan prestasi akademik dan non akademik di MI Sirojul Huda dan MI Tarbiyatul Athfal.

Kata kunci: partisipasi masyarakat; pengembangan madrasah, mutu pendidikan

ABSTRACT

MUSTAIN, 2020: COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF MADRASAH IBTIDAIYAH TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION (CASE STUDY) IN MADRASAH IBTIDAIYAH KECAMATAN BOGOREJO, BLORA DISTRICT, Supervisor: Dr. Ifada Retno Ekaningrum, S.Ag., M.Pd

The purpose of this study was to determine: 1) To describe and analyze community participation in the development of human resources (HR) in Madrasah Ibtidaiyah in Bogorejo District, Blora Regency. 2) To describe and analyze community participation in the development of facilities and infrastructure for Madrasah Ibtidaiyah in Bogorejo District, Blora Regency. 3) Discussing the quality of education in Madrasah Ibtidaiyah in Bogorejo District, Blora Regency.

This type of research is qualitative research. The research site is Madrasah Ibtidaiyah located in the District of Bogorejo Blora, namely MI Sirojul Huda and MI Tarbiyatul Athfal. The focus of this research is community participation in the development of Madrasah Ibtidaiyah which is in the District of Bogorejo Blora. The data collection technique is done by using the method of observation, interviews, with supporting documents. Data validity was performed using data triangulation, member checks, compiling data bases, credibility testing and compiling evidence of the research chain. Data analysis was performed using qualitative descriptive analysis.

The results of the research show that: 1) The nuances of openness, mutual trust in decision making, program implementation, program utilization and evaluation of madrasah programs facilitated and bridged by madrasah are a form of community participation in the development of human resources in Madrasah Ibtidaiyah in Bogorejo District, Blora Regency so that they can accommodate the aspirations and needs of the community and mobilize and channel community participation in the field of education. 2) Community participation in contributing to ideas by planning the provision of infrastructure needed by madrasahs, is a form of community participation in the development of facilities and infrastructure for madrasah ibtidaiyah in Bogorejo District, Blora Regency. 3) The quality of education at MI Sirojul Huda and MI Tarbiyatul Athfal can be realized through good cooperation between the school, including the school principal, the school committee and the community with indications of many academic and non-academic achievements at MI Sirojul Huda and MI Tarbiyatul Athfal.

Key words: community participation; development of madrasahs, quality of education

نبذة مختصرة

إندونيسيا أمة متعددة الأديان والأعراق والجماعات الاجتماعية التي تمتلكها. التعددية حقيقة لا جدال فيها في هذا الأرخبيل. من ناحية، تصبح هذه التعددية رأس المال الاجتماعي لبناء الأمة، ومن ناحية أخرى، تصبح إمكانية كامنة للصراع الاجتماعي. وهذا ما يجعل شعار التسامح غير قائم على المجتمع. هذا النوع من البحث الذي يستخدمها المؤلف هو أسلوب التحليل الوصفي، وتتضمن عملية تحليل البيانات لاثمرا حلوهي (1) الوصف، (2) الصياغة، و (3) التفسير. مع نتائج البحث، (1) يتماشى التسامح في هذه الحالة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأن جميع المسلمين في إندونيسيا يدركون أن التسامح مبدأ فكري يجب حمايتها والحفاظ عليها في مجتمع تعددي. موقف التسامح هو مظهر من مظاهر مبدأ المساواة لخلق طابعا للمساعدة والمساعدة وموقف الرعاية الاجتماعية بيننا وانا المواطنين، والتبديد ورهاستخلاقا حساسا قويا بالوحدة والتضامن الاجتماعي في حياة الناس.

الكلمات المفتاحية: التسامح، التواصل بين الأديان في قرية كانديريجو

Transliterasi Arab-Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	ā'(H	(H	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	ād)S	(S	S (dengan titik di bawah)
ض	ād(D	(D	D (dengan titik di bawah)
ط	ā'(T	(T	T (dengan titik di bawah)
ظ	ā'(Z	(Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah. segala puji bagi Allah SWT. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, penulis telah dapat menyelesaikan tesis dengan judul “*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus) di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora*” untuk memenuhi salah satu syarat yang diperlukan dalam menyelesaikan studi pada Sekolah Pascasarjana Magister Pendidikan Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Adanya penelitian ini setidaknya dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau masukan untuk kebermanfaatan pengembangan mutu pendidikan madrasah Ibtidaiyah khususnya di Kecamatan Bogorejo dan umumnya di Kabupaten Blora.

Proses penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Secara khusus, disampaikan ucapan terima kasih yang setulus - tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Mahmutarom, H.M selaku rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian.

2. Prof. Dr. Mudzakir Ali, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian.
3. Dr. Ifada Retno Ekaningrum, S.Ag., M.Pd, selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan mengarahkan pembuatan tesis ini dengan tekun dan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
4. Seluruh Staf Pengajar Sekolah Pascasarjana Magister Pendidikan Islam UNWAHAS yang telah memberikan bekal penulis dengan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam hidup dan berkarya dalam masyarakat.
5. Seluruh Staf Administrasi Sekolah Pascasarjana Magister Pendidikan Islam UNWAHAS yang dengan sabar dan penuh pengertian memberikan layanan dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepala MI Sirojul Huda dan MI Tarbiyatul Athfal Bogorejo yang telah memberikan ijin penelitian di lembaga yang dipimpinnya.
7. Semua-pihak yang telah membantu proses penulisan tesis ini hingga selesai yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala masukan dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan kajian-kajian di masa mendatang.

Kepada semua pihak mohon maaf jika selama proses penulisan maupun isi tesis ini tidak berkenan. Semoga tesis ini ada manfaatnya bagi yang membaca dan yang membutuhkannya. Amin.

Semarang, September 2020

Penulis.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke that extends to the right.

MUSTAIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan.....	21
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Riset Terdahulu	24
B. Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Madrasah	27

1. Partisipasi Masyarakat	27
2. Pengembangan Madrasah	47
3. Peningkatan Mutu Pendidikan	52
C. Kerangka Berpikir	63
BAB III : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Madrasah Ibtidaiyah di Bogorejo.....	66
B. Sajian Data Penelitian	69
1. Partisipasi dalam Pengembangan Madrasah di MI Sirojul Huda	69
2. Partisipasi dalam Pengembangan Madrasah di MI Tarbiyatul Athfal	80
3. Kualitas Pendidikan MI di Bogorejo Blora	105
BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN	
1. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora	110
2. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Madrasah	116
3. Analisis Partisipasi Masyarakat untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Ibtidaiyah Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora.....	168

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	132
B. Saran	133
C. Penutup.....	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator kemajuan bangsa dikarenakan pilar kebudayaannya kokoh. Pendidikan merupakan jantung kebudayaan. Hidup matinya kebudayaan suatu bangsa tergantung pada kuat tidaknya denyut jantung kebudayaan yang terletak pada denyut pendidikan. Sejak masa lalu, masa kini, dan perspektif masa depan, pendidikan menjadi sesuatu yang paling berharga. Begitu pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan, dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam memberikan pemahaman mengenai pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak dan karakter bangsa (*National Character Building*).

Adanya persaingan yang ketat dalam dunia pendidikan yang semakin tinggi, maka diperlukan sinergitas dengan masyarakat, karena bagaimanapun adanya dukungan dan minat dari masyarakat terhadap pendidikan bisa memberikan harapan keberhasilan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam sebuah hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَوْلُودٍ
يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah R.A, Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda
: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, ayah dan

ibunyalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”
(HR. Bukhori dan Muslim)

Kemudian dikuatkan dengan Q.S Attahrim : 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At tahrir : 6)

Desentralisasi merupakan salah satu konsep dalam gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat. Penyerahan wewenang pengelolaan dan pengembangan madrasah dari pemerintah pusat ke daerah sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam memberdayakan lingkungan masyarakat beserta potensi yang dimilikinya.

Madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan tidaklah mungkin berdiri secara sendirian, ada komponen-komponen lain sebagai penyangga berdirinya institusi tersebut, diantaranya adalah masyarakat. Masyarakat dan madrasah seperti memiliki hubungan saling memberi dan saling menerima. Lembaga pendidikan merealisasi apa yang dicita-citakan oleh warga masyarakat tentang pengembangan putra-putra mereka. Hampir tidak ada orang tua siswa yang mampu membina sendiri putra-putra mereka untuk dapat tumbuh dan

berkembang secara total, integratif dan optimal seperti yang dicitacitakan oleh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya lembaga-lembaga pendidikan mengambil alih tugas ini. Lembaga pendidikan memberi sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat. Dalam perjalanan menuju madrasah yang unggul baik pihak madrasah maupun masyarakat harus saling bekerja sama. Salah satu upaya agar kinerja madrasah dapat berjalan dengan efektif adalah dengan menggandeng masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dan perkembangan madrasah. Secara historis kehadiran dan perkembangan madrasah, merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari, oleh dan untuk masyarakat (Tilaar 2018:169) .

Melihat jasa dan pemberian dari madrasah kepada masyarakat, maka sebaliknya akan terjadi timbal balik diantara keduanya. Masyarakat juga memberikan sesuatu yang tidak kalah pentingnya yaitu berupa tanggung jawab. Masyarakat yang terbina dengan baik akan merasa bahwa lembaga pendidikan itu adalah juga miliknya, dipelihara, dipertahankan, dan dimajukan secara baik.

Sebuah lembaga pendidikan yang mengadakan kontak dengan masyarakat akan memudahkan organisasi pendidikan tersebut menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Lembaga pendidikan lebih mudah menempatkan dirinya dalam masyarakat dalam arti dapat diterima sebagai bagian dari milik masyarakat. Dengan demikian, hubungan masyarakat memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan mutu lembaga pendidikan. Masyarakat yang dimaksud disini bisa orang tua murid atau masyarakat umum ataupun pihak yang berada di sekitar lingkungan

madrasah. Bukan sekedar mengharapkan uluran tangan dari pemerintah, oleh karena itu sistem penyelenggaraan harus percaya pada kemampuan masyarakat untuk bertanggung jawab kepada pendidikan generasi mudanya (Tilaar 2018:169).

Tilaar berpendapat bahwa pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan masyarakat diartikan bahwa masyarakat diikutsertakan dalam program-program kependidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah, tentu hal ini searah dengan kecenderungan masyarakat karena madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang telah berkembang adalah lahir dari kebutuhan nyata masyarakat itu sendiri (2018:169). Oleh karena itu, madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki visi, misi dan karakteristik yang khas dilihat dari segi sosial budaya, politik, bahkan ekonomi.

Pada era sekarang ini, orientasi pendidikan harus mengutamakan mutu sebagai produk pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan yang tidak mengorientasikan pembelajarannya pada pencapaian mutu, cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh konsumen atau masyarakatnya. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang menjadikan mutu sebagai orientasi dan standar kualitasnya akan terus dicari oleh masyarakat sebagai konsumen pendidikan.

Istilah mutu secara umum, mutu mengandung pengertian suatu derajat atau tingkat keunggulan suatu produk dari hasil kerja baik berupa barang maupun jasa, secara langsung maupun tidak langsung, kongkrit maupun abstrak. Mutu pendidikan menyangkut dapat tidaknya hasil pendidikan

dipakai sebagai instrumen yang tepat guna untuk keperluan hidup. Mutu ini menyangkut mengenai silabus, materi pengetahuan, nilai-nilai, hal normatis dan estetis, unsur yang efektif dan ekonomis, keterampilan sosial dan manajerial, keterampilan teknis, standardisasi, tenaga guru, dan lain-lain. Mutu merupakan orientasi utama dari suatu produk, sejauh mana suatu produk memenuhi kriteria, standar atau rujukan.

Orientasi mutu pendidikan amat terkait dengan tiga hal: (1) *In-put*, yaitu segala sesuatu yang harus tersedia untuk berlangsungnya proses pendidikan, baik berupa sumberdaya, perangkat lunak maupun harapan-harapan sebagai panduan bagi berlangsungnya proses pendidikan. *In-put* sumberdaya meliputi SDM (Kepala madrasah, guru, karyawan, siswa, dan masyarakat) dan sumberdaya lainnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya). *In-put* perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dan lain-lain. *In-put* harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh madrasah. Kesiapan *in-put* sangat diperlukan agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. (2) Proses. Yakni usaha untuk mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain yang berpengaruh. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *in-put*, sedang sesuatu dari hasil proses dinamakan *out-put*. Dalam pendidikan madrasah, proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, pengelolaan lembaga, pengelolaan program, proses belajar mengajar, serta proses monitoring dan evaluasi. Suatu proses dikatakan bermutu tinggi manakala terjadi perpaduan

dan koordinasi antara *in-put* (kepala madrasah, guru, siswa, masyarakat, kurikulum, biaya pendidikan, peralatan dan lain-lain) secara harmonis sehingga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan pembelajaran yang mampu memberdayakan peserta didik. Sedangkan proses dikatakan rendah manakala menampakkan hasil sebaliknya. (3) Out-put merupakan hasil kinerja lembaga pendidikan. Kinerja madrasah adalah prestasi yang dihasilkan dari proses pendidikannya.

Oleh karena itu, hubungan masyarakat harus bisa menjalankan fungsinya untuk mengembangkan program lembaga. Dengan demikian madrasah harus bisa menjadi mercusuar penerang bagi masyarakat. Sebagai mercusuar penerang, madrasah harus mampu memberikan tauladan tentang cara hidup yang benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi berdaya. Pada saat yang sama madrasah harus menampung semua aspirasi dan kondisi masyarakat lokal dengan membuat program pendidikan yang sesuai dengan masyarakat (Pidarta 2002:192-193).

Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora adalah sebanyak dua madrasah, yaitu MI Sirojul Huda Bogorejo dan MI Tarbiyatul Athfal. Kedua madrasah tersebut, memiliki semangat yang sama dalam mengembangkan dan melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk meningkatkan mutu pendidikan. Setiap tahun peminatnya melebihi peminat sekolah dasar di sekitar madrasah masing-masing, dan

sering melebihi daya tampung. Jumlah pendaftar pada kedua MI tersebut, setiap tahunnya selalu meningkat.

Banyak masyarakat sekitar Kecamatan Bogorejo yang memilih Madrasah Ibtidaiyah/ MI sebagai tempat menimba ilmu karena masyarakat sudah memercayai bahwa citra dan reputasi MI di Kecamatan Bogorejo baik dengan menawarkan pelayanan (*service*) berupa program dan fasilitas unggulan yang dibutuhkan pelanggan (*customer/* siswa dan masyarakat luas), dan memiliki kelebihan dibanding sekolah dasar yang sangat sedikit mengajarkan ilmu agama. Kondisi tersebut tercapai, antara lain karena adanya jalinan komunikasi yang efektif antara madrasah dan masyarakat.

Kedua Madrasah Ibtidaiyah tersebut cukup terbuka terhadap segala bentuk kritik dan aspirasi dari masyarakat, sehingga program pendidikan yang ditawarkan madrasah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagai contoh aspirasi didapat dari komite sebagai fasilitator masyarakat, yang sering menjalin kontak dengan madrasah melalui pertemuan bulanan. Pertemuan komite madrasah dengan orang tua siswa sering diadakan sebagai sarana silaturahmi dan melihat kondisi madrasah, yang didalamnya saling bertukar informasi dan setiap ada ide baru, aspirasi dan tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan madrasah selalu diinformasikan kepada madrasah begitupula sebaliknya. Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada kepala madrasah untuk ditindak lanjuti, kepala madrasah memanggil wakil kepala madrasah untuk merancang program yang akan dilaksanakan, setelah itu kepala madrasah menginformasikan hasil rapatnya dengan wakil

kepala madrasah kepada semua guru dan karyawan, siswa (orang tua siswa) dan komite madrasah. Barulah dialokasikan tugas dan tanggung jawabnya pada masing-masing yang bersangkutan. Begitupun dengan kegiatan humas yang dibantu oleh alumni, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, komite madrasah dan siswa madrasah dalam bentuk kegiatan seminar, bazar, penyuluhan masyarakat, pengajian dan bakti sosial, ini merupakan bentuk komunikasi langsung yang dilakukan humas kepada masyarakat untuk menggugah partisipasi masyarakat dalam rangka memberikan layanan yang baik, juga melalui surat, telepon dan tatap muka langsung. Setiap tahun juga diadakan rapat pleno untuk membahas kegiatan dan pertanggung jawaban kepala madrasah, kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat disekitar MI Sirojul Huda Bogorejo telah terwujud, baik dalam bentuk materiil maupun dukungan moril. Misal, pada saat madrasah mengalami kekurangan lokal, masyarakat dengan bergotong royong membantu penuh mulai dari anggaran pembangunan sampai membantu tenaga bekerja bakti membangun gedung sekolah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga diwujudkan dengan ikut membantu proses pembelajaran agama (madrasah diniyah) pagi sebelum pembelajaran di mulai (Wawancara Kepala MI Sirojul Huda Bogorejo).

Di MI Tarbiyatul Athfal, partisipasi masyarakat sekitar madrasah juga telah terwujud, baik dalam bentuk materiil maupun dukungan moril. Sebagaimana dengan MI yang lain di Bogorejo ketika mengalami kekurangan lokal, masyarakat dengan bergotong royong membantu penuh mulai dari

anggaran pembangunan sampai membantu tenaga bekerja bakti membangun gedung sekolah. Partisipasi masyarakat juga diwujudkan dengan ikut membantu pembelajaran madin pagi yang merupakan program tambahan yang diberikan sebelum pembelajaran di mulai (Wawancara Kepala MI Tarbiyatul Athfal Bogorejo).

Masyarakat sendiri berhak mengkritisi kinerja sekolah, agar lembaga milik umum ini tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi utamanya. penerapan MBS sebagai keharusan yang bisa dijadikan fondasi ataupun tiang penyangga utama pendidikan persekolahan yang berada pada wilayah tertentu di mana masyarakat tinggal. Orang tua siswa biasanya mengenal secara baik atau setidaknya serba sekilas sekolah tempat anaknya menempuh pendidikan dan pembelajaran. Sekolah merupakan tempat yang paling penting bagi orang tua untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang pendidikan anaknya. Jika sekolah menempatkan guru-guru pada rasa percaya diri yang tinggi dan menjalin hubungan yang baik dengan orang tua maka orang tua pun memiliki respek kepada guru-guru dengan gaya masing-masing.

Adanya peran dari kelompok-kelompok masyarakat, juga bisa membantu proses pendewasaan dan kematangan individu sebagai anggota kelompok dalam suatu masyarakat. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga sekolah, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Adanya sumbangan dari masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan sosial ekonomi dapat sadar bahwa betapa pentingnya peranan dukungan mereka

untuk mencapai keberhasilan pembelajaran di sekolah dan untuk memperbaiki mutu pendidikan sekolah dan bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini lebih mendasarkan tentang bentuk partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam lingkup madrasah itu sendiri. Selain itu, apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora?
3. Bagaimana mutu pendidikan setelah adanya partisipasi masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana prasarana Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mutu pendidikan setelah adanya partisipasi masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teori
 - a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu manajemen dalam pendidikan Islam, sehingga dapat diapresiasi dan dijadikan masukan bagi umat Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan objek kajian ilmiah lebih lanjut, sehingga nanti hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi lembaga pendidikan atau madrasah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah.

2. Secara Praktis

- a. Untuk pengembangan bagi lembaga atau institusi terkait, dalam hal ini madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.
- b. Untuk bahan informasi bagi madrasah, guru, orang tua dan masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan swasta, khususnya Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbangan pemikiran bagi peningkatan mutu madrasah dan penentuan kebijakan yang berkaitan dengan upaya madrasah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi (gabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2012:4). Pada dasarnya penelitian kualitatif mencermati manusia

dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

2. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini yakni merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi (gabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2015:7). Pada dasarnya penelitian kualitatif mencermati manusia dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution 2011:5).

Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan. Dengan demikian untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat dalam ikut serta pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora ini perlu pengamatan mendalam dan penghayatan terhadap gejala yang menjadi fokus penelitian.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dipaparkan cukup luas, mengingat keterbatasan yang peneliti miliki, baik keterbatasan waktu, tenaga, maupun biaya, dan

agar pembahasan ini tidak terlalu luas, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Penelitian ini mendeskripsikan secara mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah.
- b. Masyarakat dalam penelitian ini adalah wali siswa, warga yang ada di sekitar madrasah, dan donatur madrasah, yang tergabung ke dalam komite madrasah.
- c. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dijelaskan sebagai keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat, dalam perubahan yang ditentukannya sendiri, membangun diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Wujud partisipasi masyarakat berupa dana, barang, tenaga, dan pemikiran.
- d. Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora sebanyak dua madrasah, yaitu MI Sirojul Huda, dan MI Tarbiyatul Athfal.
- e. Pengembangan madrasah pada penelitian ini, hanya pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan sarana dan prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora.
- f. Subjek penelitian ini adalah semua pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan sekolah, yaitu: Kepala madrasah, wakil kepala madrasah, komite madrasah yang terdiri dari wali siswa, masyarakat sekitar madrasah dan donatur madrasah, yang berhubungan langsung dengan

partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora

4. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu, dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Kepala Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo, sebagai sumber informasi data secara menyeluruh mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana prasarana madrasah.
- b. Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo, sebagai sumber informasi data secara menyeluruh mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana prasarana.

- c. Wali siswa Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo, sebagai sumber informasi data secara menyeluruh mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah.
- d. Tokoh masyarakat, dan pengusaha/ donatur Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo, sebagai sumber informasi data secara menyeluruh mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora, yang difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab dengan sumber data secara langsung (Anas Sudijono 2006:5). Yang diwawancarai dalam hal ini meliputi kepala sekolah/ madrasah, guru, dan pengurus yayasan, komite sekolah serta masyarakat sekitar. Penggunaan teknik ini dilakukan dengan kombinasi antara model wawancara yang ditetapkan (*guided interview*) sesuai dengan permasalahan dan model wawancara yang tidak teratur, dalam artian

dialog tanya jawab yang dilakukan dalam bentuk bebas (*inguided interview*), akan tetapi tidak menyimpang dan lebih diarahkan pada titik permasalahan (garis besar) atau pada informasi yang kurang jelas diperoleh, jadi metode wawancara yang digunakan disini adalah campuran antara *guided* dan *inguided* interview (bebas terpimpin).

Data yang diambil dari wawancara ini adalah data mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan MI di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora.

b. Observasi.

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti (Sutrisno Hadi 2008:56).

Objek yang diobservasi dalam penelitian ini adalah keadaan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora, meliputi berbagai pelaksanaan program madrasah dan bentuk partisipasi baik sumber daya manusia ataupun sarana prasarana oleh masyarakat sekitar dalam pengembangan madrasah. Observasi yang dilakukan di sini adalah termasuk gabungan observasi partisipan dan non partisipan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (objek penelitian), seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, modul, jurnal, brosur dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji (Anas Sudijono 2006 : 36).

Dengan teknik ini, dapat diambil data mengenai guru dan karyawan serta kepala sekolah, pelaksanaan administrasi pendidikan dan evaluasi, termasuk rapat-rapat, notulen, SK-SK pembagian tugas, serta data lain yang relevan.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan tentang keadaan guru di semua MI, keadaan sekolah/ madrasah, serta sarana prasarana madrasah.

d. Kuesioner

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pendapat/ pandangan masyarakat mengenai keberadaan madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora.

6. Teknik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Lexy. J. Moleong 2006:321). Pelaksanaan teknik pemeriksaan dalam penelitian kualitatif didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, misalnya: kredibilitas, keteralihan (*transferabilitas*), kebergantungan (*dependabilitas*), dan kepastian (*konfirmabilitas*).

Kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negative, pengecekan anggota. Secara operasional dalam penelitian

ini, pengecekan data dilakukan dengan cara *triangulasi*, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi yang dipakai peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, baik dari responden lain dengan materi pertanyaan serupa, dari hasil observasi dan dokumentasi maupun dari literature yang relevan. Peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain:

- a. Mengecek dan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan.
- b. Mengecek dan membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain (terutama pandangan para ahli yang terdapat pada kajian teori/Bab II)
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

7. Teknik Analisis Data dan Intepretasi

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data (baik data dari observasi, dokumentasi maupun wawancara), peneliti menganalisis data-data tersebut. Menurut Bogdan dan Biklen, yang dikutip oleh Lexy J.

Moleong mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis induktif yang berarti bahwa kategori, tema dan pola berasal dari data. Menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip oleh Rulam Ahmadi mengatakan bahwa kategorikategori yang muncul dari catatan lapangan, dokumen, dan wawancara tidak ditentukan sebelum pengumpulan data (Rulam Ahmadi 2005:2). Setelah memperoleh data dan terkumpul dari kegiatan lapangan kemudian data di analisa secara kualitatif dengan tehnik pengelompokan data untuk selanjutnya di ambil kesimpulan. Usaha pengelompokan data sampai pengambilan keputusan ini dilakukan dengan meringkas deskripsi data menjadi deskripsi terfokus, oleh karenanya dalam teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan *descriptive analysis*, atau sering disebut deskriptif analitik yaitu dengan cara memadukan data yang otentik dengan berfikir induksi untuk kemudian menghasilkan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan, yakni peneliti mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan, pengumpulan dokumen-dokumen dan catatan-catatan lapangan. Analisa data yang dihimpun dari wawancara mendalam dan catatan lapangan berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan pada proses yang paling awal

dalam penelitian; selama pembuatan konseptual; dan fase pertanyaan-memfokus pada penelitian. Dengan kata lain, proses analisis data berlangsung melalui dua tahap yakni selama proses pengumpulan data dan pada akhir pengumpulan data yang nantinya berbentuk penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang ada secara induktif.

F. Sistematika Pembahasan Tesis

Sistematika pembahasan juga merupakan sesuatu yang mencerminkan urutan pembahasan dari setiap bab agar penulisan tesis ini dapat dilakukan secara urut dan terarah. Adapun sistematika tesis ini terdiri dari 5 bagian:

Pada bagian satu, yaitu bab pertama pendahuluan, meliputi : Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian berikutnya yakni bab kedua, berisi konsep teori yang meliputi : Kajian teoritik, kajian penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.

Kemudian bagian berikutnya yaitu bab ketiga, berisi metode penelitian yang terdiri atas: Tempat dan waktu penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data dan hasil penelitian dideskripsikan secara naratif

Bagian berikutnya bab keempat, yang berisi paparan data hasil penelitian dan analisis, profil setting penelitian, temuan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo dan analisis data yang berisi gagasan peneliti, penafsiran

dan penjelasan dari temuan atau teori yang diungkap dari lapangan tentang analisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo.

Pada bagian terakhir yakni bab kelima : yaitu penutup berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan, rekomendasi yang diajukan dan daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Riset Terdahulu

Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian tesis ini, yaitu :

Pertama, Tesis Program Pascasarjana UIN Malang yang diteliti oleh NurJihadberjudul:“*Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendidikan Islam (Studi Multisitus SMPN 1 Taliwang dan MTsN 1 Taliwang Sumbawa Barat)*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen partisipasi masyarakat dalam program pendidikan Islam. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis multisitus, dengan hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan sekolah sangat tinggi dalam komponen tertentu, sehingga disimpulkan bahwa dukungan atau partisipasi masyarakat hanya berupa materi (iuran SPP) dan no nmateri (dukungan moril, pengawasan, komitmen bersama dan kerjasama) sudah mendekati maksimal, sedangkan dukungan yang berupa sumbangan ide, saran dan pemikiran untuk pengembangan program pendidikan belum maksimal (Nur Jihad 2010:Tesis).

Kedua, Tesis Program Pascasarjana UIN Malang yang diteliti oleh Moh.Rifa’i berjudul: “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus M.A T.M.I Al-Amien Prenduan Sumenep)*”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian tersebut menggunakan

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dari temuannya adalah dalam meningkatkan mutu pendidikan lembaga MA T.M.I melakukan program pemberdayaan lewat humas pusat Yayasan Al-Amien Prenduan (YPA) dengan menggunakan pendekatan *educational* dan *missionary* serta tetap memperhatikan prinsip otoritas, kesederhanaan, kejujuran dan ketepatan terhadap masyarakat secara totalitas yang diwadahi dengan berbagai bentuk paguyuban yang diorganisir oleh masyarakat sendiri (pemberian wewenang, kepercayaan, dan pelibatan) dan fasilitas dengan berbagai program kegiatan seperti pembinaan dan pelatihan (Moh. Rifai 2008:Tesis).

Ketiga, Tesis Program Pascasarjana UIN Malang yang diteliti oleh Moh.Ramli, berjudul:“*Manajemen Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus MIN Malang Jl. Bandung)*”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui manajemen partisipasi masyarakat di MIN Malang 1, upaya yang dilakukan madrasah dalam menggalang partisipasi masyarakat dan bentuk-bentuk partisipasinya. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan perspektif emik dengan rancangan studi kasus. Temuan penelitiannya adalah dari hasil analisis data diperoleh temuan-temuan sebagai berikut: (1) Manajemen yang dikembangkan oleh MIN Malang I sifatnya adalah manajemen terbuka (*Open Management*). Adapun manajemen yang dikembangkan dalam mengelolapartisipasi masyarakat adalah manajemen partisipatif. (2) Upaya yang dilakukan oleh MIN Malang I dalam menggalang partisipasi masyarakat khususnya orangtua siswa adalah dengan cara:a) Pencitraan madrasah dari sisi kepegawaian, kurikulum, kesiswaan, sarana dan

prasarana dan lain sebagainya; b) dengan cara silaturahmi, kegiatan yang ada di MIN Malang banyak yang dikemas dengan kegiatan silaturahmi. c). dengan cara menggunakan tokoh, d) dengan cara ajakan/ himbauan. (3) Bentuk partisipasi masyarakat terhadap MIN Malang I ada yang berbentuk finansial/ materi dan ada yang berbentuk ide-ide atau gagasan pemikiran serta terakhir adalah berbentuk do'a (Moh. Ramli:Tesis).

Keempat, Tesis Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, oleh Siti Aisyah, berjudul: "*Implementasi Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat di MAN Pangkalan Balai Banyuasin*". Dalam tesis tersebut, menjelaskan bahwa hubungan antara masyarakat dan sekolahnya kurang terpelihara dengan baik dimana sekolah melaksanakan program pendidikannya sangat kurang melakukan komunikasi dengan masyarakatnya, sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu mengenai madrasah maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Permasalahan yang diteliti mengenai implementasi hubungan sekolah dengan masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya. Pada tesis penulis terdapat perbedaan yang terletak pada bentuk-bentuk partisipasi madrasah dan upaya apa saja yang dilakukan madrasah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan objek penelitiannya adalah di MAN 1 Palembang (Siti Aisyah:Tesis).

Kelima, Jurnal Pendidikan Nomor 2, Sept. 2008 tentang "Dukungan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khususnya di Sekolah". Dalam jurnal ini dikatakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pengendalian mutu pendidikan di sekolah tidak hanya sekedar ditunjukkan oleh

kesediaanya membantu dalam bentuk fisik atau bantuan biaya. Akan tetapi kepedulian mencakup aspek mutu layanan belajar (Syaiful Sagala:Jurnal Pendidikan)

Berdasarkan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian tesis dan jurnal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah di Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Bogorejo mulai dari bentuk-bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah, partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana, SDM dan manajemen kelembagaannya. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian juga berarti memiliki kondisi dan perlakuan yang berbeda pula.

B. Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

1. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang dapat diartikan sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Made Pidarta (1988: 28), memberikan definisi tentang partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa

keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Adapun pendapat lain Mikkelsen (2013) membuat daftar atau klasifikasi dari praktisi pembangunan mengenai arti dari partisipasi yang diuraikan, sebagai berikut:

- 1) Partisipasi diartikan sebagai pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerimad an kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan pertemuan (rapat) dengan dalih partisipasi tidak lebih sebagai ajang formalitas untuk menjalankan sebuah kebijakan yang telah dibuat. Hal demikian akan memunculkan partisipasi yang semu karena masyarakat tidak diberi hak untuk merancang program kecuali hanya sekedar diajak, dibujuk, diperintah, dan bahkan dipisahkan oleh kelembagaan tertentu untuk ikut serta dalam suatu program yang telah dirancang sebelumnya.
- 2) Partisipasi diartikan sebagai kontribusi, sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Akhir capaian dari partisipasi jenis ini adalah penghematan biaya. Disini partisipasi diartikan sebagai besarnya dana yang dapat dihemat atau dana yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah.

- 3) Partisipasi adalah suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah.
- 4) Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Inti dari partisipasi ini adalah sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan sendiri.e.Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Partisipasi dalam pengertian ini sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat, masyarakat secara bersama-sama mengupayakan jalan keluarnya dengan jalan memobilisasikan segala sumber daya yang diperlukan serta secara bersma-sama merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Partisipasi menurut Huneryager dan Heckman adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka (Siti Irine Astuti D., 2011: 51). Demikian halnya yang dinyatakan oleh Cohen dan Uphoff (1977) bahwa partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program (Peter Oakley, 2011: 51).

Partisipasi juga sebagai proses interaksi sosial ditentukan oleh proses obyektivasi yang dilakukan oleh individu dalam dunia

intersubjektif yang dapat dibedakan oleh kondisi sosiokultural sekolah. Dengan demikian, partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau obyektivasi dari sekolah dan orangtua dalam tujuan sekolah. Artinya, tidak cukup dipahami oleh sekolah bahwa partisipasi sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan sekolah dalam peningkatan mutu, karena tujuan mutu menjadi sulit diperoleh jika pemahaman dalam dunia inter subyektif (siswa, orangtua, guru) menunjukkan kesenjangan pengetahuan tentang mutu. Artinya, partisipasi orang tua dalam peningkatan mutu dapat berhasil jika ada pemahaman yang sama antar sekolah dan keluarga dalam menjadikan anak berprestasi sebagai tujuan pendidikannya (Siti IrineAstuti D., 2011: 196).

Sedangkan arti masyarakat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dinyatakan sebagai kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Masyarakat merupakan sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun di dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan sosial (Rodliyah, 2013: 32-33).

Sehingga dalam arti lebih lanjut, partisipasi dapat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara organisatoris, misalnya untuk kegiatan pembangunan fisik, orang tua peserta didik yang arsitektur diminta bantuannya membuat design bangunan, pemusik, pelukis, dramawan, dan olahragawan dilibatkan dalam kegiatan ekstra kurikuler,

praktisi hukum dilibatkan dalam masalah hukum, dan tata tertib dan profesilain yang mendukung kemajuan lembaga pendidikan.

Dari beberapa definisi di atas, maka partisipasi bisa definisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi dalam suatu kelompok sehingga dapat dimanfaatkan sebagai motivasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Selain itu, partisipasi juga diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi juga ditentukan oleh tingkat kemampuan masing-masing individu, di mana tingkat kemampuan seseorang dapat dilihat dari aspek pendidikan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan.

Madrasah dan masyarakat merupakan dua komunitas yang saling melengkapi bahkan ikut memberikan warna terhadap perumusan model pembelajaran tertentu di madrasah. Madrasah mempunyai peran dalam proses pelestarian dan pemindahan nilai-nilai kultur pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama yang dianut para guru dan peserta didiknya kepada generasi penerus.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pendidikan

Hubungan Madrasah Ibtidaiyah dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dengan instansi dan jawatan lain, dan sekolah dengan masyarakat pada umumnya (Suryosubroto, 2004:160). Hubungan yang terjalin diharapkan menghasilkan keuntungan satu sama lain. Dan semua

hubungan itu merupakan hubungan kerja sama yang bersifat pedagogis, sosiologis dan produktif.

Hubungan masyarakat dalam pendidikan merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (masyarakat ikut menalar baru bertindak), kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada ketindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 dan 56 yaitu:

- 1) Pasal 54, meliputi: (a) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (b) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- 2) Pasal 56, meliputi: (a) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah; (b) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga

mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Bagi madrasah/ sekolah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah kenyataan obyektif yang dalam pemahamannya ditentukan oleh kondisi subyektif orang tua siswa. Keikutsertaan dan kesadaran masyarakat untuk memikul tanggung jawab pendidikan merupakan suatu tuntutan yang harus diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan (Rodliyah, 2013: 82). Keikutsertaan masyarakat ini dapat diwujudkan dalam bentuk komite sekolah atau dewan pendidikan. Komite sekolah merupakan organ semi formal yang dimiliki sekolah sebagai salah satu wujud partisipasi orang tua dan masyarakat. Partisipasi orang tua dan masyarakat pada pengelolaan sekolah amat bergantung pada seberapa jauh orang tua dan masyarakat memiliki trust terhadap sekolah. Trust diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat akan menjadi sederhana dan nyaman apabila ada trust di kalangan warga masyarakat (Rodliyah, 2013: 70-71).

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan tidak hanya oleh pihak sekolah, seperti pendidik dan tenaga kependidikan, namun keberadaan masyarakat dan orangtua peserta didik ikut mewujudkan pencapaian pendidikan yang lebih baik. Salah satu upaya efektif yang dapat

dilakukan untuk memperoleh tujuan penyelenggaraan pendidikan yang baik yaitu dengan melibatkan masyarakat dan orangtua peserta didik. Hal ini diterapkan untuk memperoleh dukungan dan memberikan kesempatan bagi pihak eksternal untuk ikut berperan serta merasakan perkembangan pendidikan di daerahnya. Upaya pengadaan peran serta masyarakat atau orangtua peserta didik seperti yang dipaparkan oleh teori di atas merupakan bagian dari proses desentralisasi pendidikan (Dwiningrum, 2011).

Peran masyarakat tidak hanya dilakukan dengan dukungan yang bersifat materi, namun juga pemikiran, motivasi, serta kerjasama yang terus berjalan melalui pihak komite sekolah, pemberian bahan material atau dana untuk membangun pendidikan yang diberikannya dalam forum rapat sekolah (Lukito, 2012). Pernyataan yang dipaparkan oleh Lukito tersebut memberikan gambaran mengenai peran-peran yang dapat diberikan oleh masyarakat maupun orangtua peserta didik, peran serta tersebut ditujukan untuk membangun kerjasama yang baik antar pihak untuk mencapai pendidikan yang mampu bersaing dalam perkembangan zaman. Oleh karena itu, pihak-pihak yang dimaksud, seperti guru dan orangtua peserta didik harus terjalin dengan baik untuk meningkatkan peran serta yang diharapkan (Pradhan, dkk, 2011).

Keterlibatan masyarakat diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat ini

diharapkan akan dapat mensukseskan program pendidikan yang telah dicanangkan. Jadi, dengan kata lain keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah diperlukan agar madrasah dapat berfungsi dengan baik.

Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam menggalang partisipasi masyarakat yaitu: (Mulyasa, 2004:173-174)

- 1) Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di Madrasah yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, perpisahan, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Nasional dan pentas seni. Pelibatan masyarakat disesuaikan dengan hobi, kemampuan dan pekerjaan mereka dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan Sekolah.
- 2) Mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Tokoh tersebut yang pertama kali harus dihubungi, diajak kompromi, konsultasi dan diminta bantuan untuk menarik masyarakat berpartisipasi dalam program dan kegiatan sekolah. Tokoh-tokoh tersebut mungkin berasal dari orang tua peserta didik, figure masyarakat (kyai), olahragawan, seniman, informal leader, psikolog dan lain sebagainya.
- 3) Melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang sesuai dengan minatnya.

4) Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

Melihat madrasah dan masyarakat memiliki hubungan yang rasional dan madrasah sendiri didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat, maka tidak mungkin masyarakat tidak memperdulikan keberadaan Madrasah. Untuk itu diperlukan wadah partisipasi masyarakat untuk dapat menampung partisipasi masyarakat dan membantu madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena terbentuknya wadah partisipasi masyarakat dalam pendidikan sekarang ini, seperti Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai fungsi yang dapat diperankan.

c. Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Dasar hukum bagi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pendidikan nasional sangatlah penting, mengingat pemerintah tidak akan sanggup menyelenggarakan pendidikan dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sektor pendidikan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya adalah :

- 1) Pada pasal 6 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”.
- 2) Pada pasal 8 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”.
- 3) Pasal 9 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa “masyarakat wajib memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”

Pada pasal 6, 8 dan 9 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam kesuksesan penyelenggaraan pendidikan. Hak masyarakat dalam kesuksesan penyelenggaraan pendidikan di sekolah antara lain adalah ikut berpartisipasi dalam program pendidikan di sekolah mulai dari membuat visi, misi sekolah sampai ikut menentukan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik daerah setempat.

Sedangkan kewajiban masyarakat antara lain memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah berupa ikut berpartisipasi memberikan sumber daya yang belum dimiliki oleh sekolah yaitu dapat berupa tenaga, ide (pemikiran), pemberian bantuan buku, alat pendidikan, dan dana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi, sebagai berikut: “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”.

Dari pasal tersebut dapat diidentifikasi bahwa sumber pendanaan pendidikan tidak hanya ditanggung oleh pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), melainkan pula ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, sumber pendanaan dibiayai secara bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat [1] dan [2] yang berbunyi, sebagai berikut : [1] Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. [2] Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Berdasarkan dari undang-undang tersebut dapat dianalisis bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat meliputi perseorangan ataupun kelompok masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Selain itu pula masyarakat mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu sebagai sumber daya manusia yang merupakan input pendidikan, dan sebagai pelaksana pendidikan, serta merupakan pengguna dari output pendidikan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi, sebagai berikut : “Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi

perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.”

Pada pasal tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dari membuat perencanaan sampai melakukan evaluasi program kegiatan pendidikan di sekolah dapat melalui organisasi atau wadah seperti komiter sekolah dan dewan pendidikan. Jadi kesimpulannya, masyarakat disamping mempunyai kewajiban membiayai pendidikan, mereka juga mempunyai kewajiban untuk memikirkan, memberikan masukan, dan membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kewajiban ini sangat perlu dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat agar dapat dipahami bersama, sehingga partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan semakin menentukan bermutu atau tidaknya sebuah lembaga pendidikan.

d. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Perkembangan masyarakat Indonesia yang menjadi semakin modern menuntut keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Oleh karena itu, keleluasaan atau kebebasan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat termasuk unsur-unsur yang ada didalamnya seperti perseorangan, kelompok atau badan untuk melaksanakan peran serta dalam pendidikan nasional. Untuk menunjukkan keleluasaan bagi masyarakat dan berpartisipasi dalam pendidikan nasional terdapat

berbagai kegiatan masyarakat diidentifikasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Dalam iklim yang kompetitif sekarang ini, sulit bagi organisasi untuk dapat hidup dengan baik jika tidak memiliki kemampuan untuk mengubah diri dengan cepat dan mampu berkembang seiring dengan berbagai tuntutan stakeholder. Kondisi ini berlaku hampir pada keseluruhan organisasi baik yang bersifat profit maupun nonprofit. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang termasuk lembaga nonprofit juga tidak terlepas dari fenomena ini, itulah sebabnya dalam banyak hal lembaga pendidikan harus mengetahui berbagai harapan dan kebutuhan stakeholder. Masyarakat sebagai suatu komunitas yang dapat memberi warna terhadap madrasah memberi perhatian dalam upaya pengembangan rencana strategis lembaga tersebut.

Adapun bentuk partisipasi menurut Konkon (1989) dalam Rodliyah (2013: 40) adalah sebagai berikut: (1) sumbangan tenaga fisik, (2) sumbangan finansial, (3) sumbangan material, (4) sumbangan moral (nasihat, petuah, amanat) dan (5) sumbangan keputusan. Menurut Basrowi (1998), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi fisik dan partisipasi non fisik. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah, usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat luas, dan

menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah (Siti Irine Astuti D., 2011: 58-59).

Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam memberikan investasi dalam pendidikan berupa SPP, pajak, dan sebagainya, tetapi juga ikut serta dalam merencanakan kurikulum pendidikan, evaluasi pendidikan serta hal-hal yang menyangkut proses belajar. Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan melalui manajemen pendidikan berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Dalam manajemen berbasis sekolah harus mengikutsertakan semua *stakeholders* dalam sekolah tersebut. selanjutnya, dalam pendidikan berbasis masyarakat, semua *stakeholders* di masyarakat harus ikut serta dalam penyelenggaraan aspek-aspek manajemennya. Bentuk partisipasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan upaya mencapai keadilan sosial dengan secara langsung menunjukkan kesenjangan dan kekurangan akuntabilitas.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 adalah sebagai berikut :

- 1) Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
- 2) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
- 3) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;
- 4) Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
- 5) Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
- 6) Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
- 7) Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
- 8) Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
- 9) Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;

- 10) Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
- 11) Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- 12) Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh Pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Lebih lanjut Made Pidarta, mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain:

- 1) Alat-alat belajar
- 2) Kurikulum terutama yang lokal
- 3) Dana
- 4) Material untuk bangunan
- 5) Auditing keuangan
- 6) Control terhadap kegiatan-kegiatan sekolah

Ada beberapa bentuk keterlibatan yang biasa digunakan sekolah-sekolah yang efektif, melalui kunjungan keluarga, pertemuan dengan orang tua siswa, sukarelawan masyarakat yang menaruh perhatian dalam dunia pendidikan, dan perwakilan masyarakat pada panitia penasihat atau pertimbangan pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Clark yang dikutip Nukholis untuk mengajak orang tua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Pertama, pendekatan *school-based* dengan cara mengajak orang tua siswa datang ke sekolah melalui pertemuan-

pertemuan, konferensi, diskusi guru-orang tua dan mengunjungi anaknya sedang belajar di sekolah. Kedua, *home-based* dengan cara orang tua mengawasi anaknya dalam belajar dan ikut membantu dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut perlu disosialisasikan secara luas karena selama ini baru nampak partisipasi masyarakat berupa pengadaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan atau program pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah masih perlu memberikan dorongan dan motivasi agar bentuk partisipasi masyarakat lebih meningkat.

e. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi orang tua merupakan keterlibatan secara nyata dalam suatu kegiatan, partisipasi ini biasa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Partisipasi orang tua dan masyarakat sangat penting dalam pendidikan dan kemajuan sekolah, karena sekolah merupakan partner orang tua dalam mengantarkan cita-cita dan membentuk pribadi peserta didik. Oleh karena itu ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menggalang partisipasi orang tua dan masyarakat, yaitu :

E. Mulyasa mengemukakan, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menggalang partisipasi masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan. Misalnya, bakti sosial, perpindahan, peringatan hari besar nasional dan keagamaan, serta pentas seni. Pelibatan masyarakat disesuaikan dengan hobi, kemampuan dan pekerjaan mereka dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan Sekolah.
- 2) Mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Tokoh tersebut yang pertama kali harus dihubungi, diajak kompromi, konsultasi, dan diminta bantuan untuk menarik masyarakat berpartisipasi dalam program dan kegiatan sekolah. Tokoh-tokoh tersebut mungkin berasal dari orang tua peserta didik, figur masyarakat (Kyai), olahragawan, seniman, informal *leader*, psikolog dan lain sebagainya.
- 3) Melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang sesuai dengan minat mereka.
- 4) Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat (E. Mulyasa : 174).

Terdapat acuan lain yang dapat dijadikan rujukan lembaga pendidikan dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat sebagaimana Kementerian Pendidikan Nasional memberikan gambaran:

- 1) Melaksanakan program-program kemasyarakatan misalnya kebersihan lingkungan.

- 2) Mengadakan *open house* yang memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui program dan kegiatan sekolah. Tentu saja dalam kesempatan semacam itu sekolah perlu menonjolkan program-program yang menarik minat masyarakat.
- 3) Mengadakan buletin sekolah, majalah atau lembar informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program sekolah, untuk diinformasikan kepada masyarakat.
- 4) Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina suatu program sekolah. Misalnya mengundang dokter yang tinggal di sekitar sekolah atau orang tua murid untuk menjadi pembicara atau pembina program kesehatan sekolah.
- 5) Membuat program kerja sama sekolah dengan masyarakat misalnya dalam perayaan hari nasional dan keagamaan (E.Mulyasa : 175).

Oleh karena itu ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menggalang partisipasi orang tua dan masyarakat, yaitu :

- 1) Melibatkan orang tua dan masyarakat secara proposional dan professional dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah.
- 2) Menjalinkan komunikasi secara intensif. Secara proaktif sekolah menghubungi orang tua peserta didik dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Mengucapkan selamat datang dan bergabung dengan sekolah, dewan pendidikan, serta komite sekolah bagi orang tua peserta didik baru.
 - (b) Mengadakan rapat secara rutin dengan orang tua dan

- masyarakat, sehingga rapat dapat efektif. (c) Mengirim berita tentang semua kegiatan yang berhubungan dengan sekolah secara periodik, sehingga sekolah mengetahui program dan perkembangan sekolah. (d) Mengundang orang tua dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan prestasi peserta didik. (e) Mengadakan kunjungan rumah untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pribadi peserta didik.
- 3) Mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab antara sekolah dengan orang tua dalam pembinaan pribadi peserta didik (a) Melibatkan orang tua dalam berbagai program kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, perpisahan, peringatan hari besar nasional, keagamaan, dan pentas seni. (b) Melibatkan orang tua dalam mengambil berbagai keputusan, agar mereka merasa bertanggung jawab untuk melaksanakannya. (c) Mendorong guru untuk mendayagunakan orang tua sebagai sumber belajar dan menunjang keberhasilan belajar peserta didik. (Zainudin, 2013:66)

Tentu, adanya partisipasi masyarakat maupun orang tua merupakan suatu hal yang sangat menentukan akan keberhasilan/ output dari sebuah lembaga pendidikan dalam hal ini madrasah.

2. Pengembangan Madrasah

a. Pengertian Pengembangan Madrasah

Istilah madrasah merupakan isim makna darasa yang berarti tempat untuk belajar. Istilah Madrasah kini telah menyatu dengan sekolah atau perguruan (terutama perguruan Islam) (Rahmat Rais, 2009:12) Dinamika perkembangan Madrasah tidak bisa dilepaskan dari perkembangan Islam di Indonesia itu sendiri. Madrasah muncul karena ada beberapa hal yang melatarbelakanginya; pertama adalah faktor pembaharuan Islam dan kedua adalah respon terhadap politik pendidikan Hindia Belanda.(Maksum : 80)

Madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar memegang peranan penting dalam proses pembentukan kepribadian anak didik. Persoalan mendasar bagi MI pada umumnya menyangkut kualitas dan kuantitas guru yang belum memadai, sarana fisik dan fasilitas pendidikan yang minim, pengelolaan yang kurang profesional, jumlah murid yang sedikit dan umumnya darikalangan menengah ke bawah.

Madrasah sekarang ini telah menjadi sekolah umum yang berciri khas Islam, maka MBS bisa diterapkan di dalam madrasah menjadi MBM (Manajemen Berbasis Madrasah). Hal ini akan memberikan peluang bagi madrasah untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas agar mampu bersaing dengan sekolah umum yang lain.

Kebijakan strategi pengembangan madrasah pada era Indonesia baru, di mana aspirasi dan potensi daerah menjadi tumpuan utama dalam pembangunan, maka potensi madrasah yang dalam historisnya adalah milik masyarakat, harus dikembalikan seperti semula. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berperan sebagai pendamping masyarakat serta lembaga supervisi terutama dalam mengembangkan muatan nasional dan ciri khas madrasah sebagai institusi pendidikan yang bernafaskan agama Islam dan mengembangkan kehidupan yang serba ibadah.

Rasionalisasi pemikiran tentang madrasah ini berkaitan langsung dengan sistem pemerintahan ke depan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 perlu ditetapkan kebijaksanaan bahwa:

- 1) Penyelenggaraan madrasah tetap dilakukan oleh masyarakat, beberapa hal mengenai penyelenggaraan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, terutama pada aspek pembiayaan, kelembagaan, dan manajerial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu atap pengelolaannya, yaitu dengan membentuk dinas pendidikan dan kebudayaan dengan sub dinas keagamaan, sedangkan Kementerian Agama kabupaten atau kota berfungsi sebagai tugas pengendalian dan tugas-tugas agama.

Selanjutnya apabila dilihat dari segi pengorganisasian dan pengelolaannya, maka madrasah harus selalu dipahami dan ditempatkan

tanggung jawab yang sama dengan institusi pendidikan lainnya. Sebagai institusi pendidikan yang bernafaskan agama, maka madrasah harus bergerak dalam mekanisme organisasi yang profesional, dengan formulasi pengorganisasian dan penyelenggaraan sebagai berikut:

- 1) Pengorganisasian dan pengelolaan madrasah dalam arti penataan dan pengaturan seluruh komponen pendidikan yang memungkinkan tercapainya tujuan institusional, secara bertahap dilimpahkan kepada pihak madrasah (*school based management*) dan didukung oleh masyarakat (*community based education*), sehingga madrasah tidak terisolasi dari komunitasnya.
- 2) Orientasi pengorganisasian dan pengelolaan madrasah diarahkan kepada terciptanya hubungan timbal balik antara madrasah dan masyarakat dalam rangka memperkuat posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan.
- 3) Struktur pengorganisasian dan pengelolaan madrasah bersifat fleksibel sesuai madrasah dan pengelolaan madrasah bersifat terbuka dan demokratis.
- 4) Pengelolaan madrasah dikembangkan melalui pendekatan profesional yang memungkinkan tumbuh dan berkembang segenap potensi madrasah.
- 5) Manajemen madrasah diberi peluang yang memungkinkan terciptanya kerja sama dengan unsur dan unit kerja lain dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

- 6) Pengelolaan madrasah perlu mengembangkan konsep-konsep keterpaduan yang mencakup : keterpaduan lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), keterbukaan antar jenjang pendidikan (MI, MTs, dan MA).
- 7) Pengawasan atau kontrol pengorganisasian dan pengelolaan madrasah dilakukan oleh suatu badan atau dewan sekolah yang memiliki kompetensi sebagai pendamping pengelola madrasah.
- 8) Perlu disiapkan perangkat atau tindakan hukum bagi mereka yang melanggar atau menyimpang dari prosedur dan etika pengelolaan dan pengorganisasian madrasah.(Abdul Rahman Saleh : 144)

Madrasah di Indonesia dalam hal ini swasta masih sangat tergantung pada uluran dana dari Kementerian Agama. Keberadaan madrasah swasta semakin tergantung dengan dana BOS dari pemerintah. Program sekolah gratis telah menghipnotis masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa semua sekolah harus gratis. Sementara dana BOS yang ada kurang bisa memenuhi dana penyelenggaraan pendidikan. Inilah program yang dianggap telah menurunkan tingkat kemandirian madrasah maupun sekolah swasta.

b. Kebijakan Pengembangan Madrasah

Kebijakan dalam pengembangan madrasah perlu mengakomodasi tiga kepentingan berikut :

- 1) Bagaimana kebijakan itu pada dasarnya harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam. Menghadirkan sistem

madrasah dalam pentas pendidikan di Indonesia merupakan wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman

- 2) Bagaimana kebijakan itu memperjelas dan memperkuat keberadaan madrasah sederajat dengan sistem sekolah, sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, serta produktif.
- 3) Bagaimana kebijakan itu bisa menjadikan madrasah mampu merespons tuntutan- tuntutan masa depan. Berdasarkan tiga macam kepentingan itu, dapat dilaksanakan pemetaan sebagai berikut. Kepentingan pertama mengemban misi dakwah, kepentingan kedua mengemban misi pendidikan, kepentingan ketiga mengemban misi pembaharuan. (Mujamil Qomar : 89)

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

a. Konsep Mutu Pendidikan

Istilah mutu adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa (*services*) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan (*satisfaction*) pelanggan (*customers*) dalam dunia pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yakni internal *customer* dan eksternal.

Internal customer adalah siswa ataupun mahasiswa sebagai pembelajar (*learners*) dan eksternal *customer* yaitu masyarakat dan dunia industry (Nanang Fattah, 2013: 2). Pendapat lain mengatakan, mutu merupakan sebuah derajat variasi yang terduga standar yang digunakan

dan memiliki ketergantungan pada biaya yang rendah. Deming sebagaimana dikutip Jerome S, mutu berarti pemecahan untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus (Jerome S. Arcaro, 2005: 8). Sedangkan menurut Juran, mutu diartikan sebagai kesesuaian penggunaan atau tepat untuk pakai. Pendekatannya adalah orientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, dengan beberapa pandangannya: (a) meraih mutu merupakan proses yang tidak kenal akhir; (b) perbaikan mutu merupakan proses yang berkesinambungan; (c) mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administratif; (d) prasyarat mutu adalah adanya pelatihan seluruh warga sekolah (Nur Zazin, 2011: 54).

Istilah mutu dalam konteks pendidikan, adalah *quality in fact* yang merupakan profil lulusan institusi pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi tujuan yang berbentuk standar kemampuan dasar atau kualifikasi akademik minimal yang dikuasai oleh peserta didik. Sedangkan, pada *quality in perception*, pendidikan adalah kepuasan dan bertambahnya minat pelanggan eksternal terhadap lulusan pendidikan (Nur Zazin, 2011: 63).

Bisa dikatakan jika kualitas mutu dapat dikelola, maka mutu juga harus dapat diukur (*measurable*). Mutu juga merupakan keunggulan “*excellence*” atau hasil yang terbaik (*the best*). Untuk mengejar mutu, maka kesalahan harus dieliminasi untuk mencapai keunggulan kompetitif lulusan sekolah dan keunggulan komparatifnya dengan yang lain sesuai dinamika pasar tenaga kerja.

b. Mutu Pendidikan di Sekolah/ Madrasah

Konsep mutu adalah elite, karena hanya sedikit institusi yang dapat memberikan pengalaman dengan mutu tinggi kepada peserta didik. Mutu juga digunakan sebagai suatu konsep yang relatif. Mutu juga dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sudah sesuai standar atau belum (Nur Zazin, 2011:55).

Mutu pendidikan adalah suatu evaluasi terhadap proses pendidikan dengan harapan tinggi untuk dicapai dan mengembangkan bakat-bakat para pelanggan pendidikan dalam proses pendidikan (Charles Hoy dkk. dalam Syafaruddin 2002: 47)

Mutu pendidikan berarti seseorang yang mencapai tujuan dari kurikulum (*objectives of curriculum*) yang dirancang untuk penggolongan kelas pelajar. Mutu pendidikan juga diartikan sebagai seseorang di mana karakteristik yang dibutuhkan itu dicapainya. Mutu pendidikan secara multidimensi meliputi aspek mutu input, proses, dan output. Oleh karenanya, pengembangan pencapaian mutu harus secara holistik dimulai dari input, proses, dan output. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, konteks pendidikan sebagaimana mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.

1. Input Pendidikan

Input pendidikan merupakan segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk proses yang akan berlangsung. Sesuatu yang

dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, dan program. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Maka dari itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut. Secara rinci input pendidikan ini meliputi:

- a) Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas;
- b) Sumber daya yang tersedia dan siap;
- c) Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi;
- d) Memiliki harapan prestasi yang tinggi;
- e) Fokus pada pelanggan (Nurkolis, 2003).

2. Proses Pendidikan

Proses pendidikan berskala mikro pada tingkat sekolah/madrasah, adalah proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, belajar mengajar, dan monitoring

dan evaluasi. Proses belajar mengajar merupakan kepentingan yang memiliki tingkat tertinggi disbanding proses lainnya.

3. Output Pendidikan

Output sendiri diartikan sebagai termasuk kinerja madrasah. Kinerja madrasah merupakan prestasi yang dihasilkan dari proses/perilaku madrasah. Kinerja dapat diukur dari aspek kualitas, efektivitas, produktivitas, efesiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja dan moral kerja. Khususnya yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat disebutkan bahwa output madrasah/ sekolah harus memiliki kualitas tinggi, dari prestasi khususnya prestasi belajar siswa juga menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam pembelajaran.

Sehingga dapat diartikan bahwa mutu pendidikan adalah kebermutuan dari berbagai layanan institusi pendidikan kepada siswa maupun staf pengajar untuk terjadinya proses pendidikan yang bermutu sehingga akan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan untuk terjun ke lingkungan masyarakat (Nur Zazin, 2011: 66).

c. Peningkatan Mutu Pendidikan Lingkup Madrasah

Peningkatan mutu pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar yang menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Peningkatan mutu berkaitan dengan target yang harus dicapai, proses

untuk mencapai, dan faktor-faktor yang terkait. Dalam hal ini ada dua aspek yang perlu mendapatkan perhatian, yakni aspek kualitas hasil dan aspek proses mencapai hasil tersebut.

1. Peningkatan Kualitas Lulusan

Peningkatan kualitas sekolah senantiasa bermuara pada peningkatan kualitas lulusan. Disebut berkualitas manakala lulusan dapat mencapai standar yang telah ditentukan. Semakin tinggi dan melampaui standar semakin berkualitas lulusan tersebut. Sebaliknya, semakin jauh dari standar semakin rendah kualitas yang bersangkutan. Penguasaan kompetensi tersebut diukur dalam skor nilai sebagai cermin dari hasil belajar. Penentuan sasaran diikuti dengan target seberapa jauh atau seberapa tinggi sasaran tersebut dapat dicapai. Kualitas mempunyai tolak ukur yang lain selain standar kualitas.

2. Peningkatan Kualitas Proses Belajar Mengajar

Interaksi guru dan siswa, khususnya di ruang-ruang tertentu di sekolah merupakan inti dari madrasah/ sekolah. Kualitas proses belajar mengajar ditentukan oleh kualitas interaksi guru-siswa tersebut. Kualitas interaksi guru dan siswa ditentukan oleh status kesiapan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di satu sisi dan pada sisi lain ditentukan oleh kesiapan siswa untuk menjalani proses pembelajaran (Zamroni, 2013: 2-4).

Ada teori peningkatan mutu sekolah yang menekankan pada kultur sekolah dalam kerangka model *The Total Quality Management*

(TQM). Penjelasan dari teori ini bahwa mutu sekolah mencakup tiga kemampuan, yaitu: kemampuan akademik, sosial, dan moral. Meski demikian, pada umumnya yang mendapatkan penekanan adalah kemampuan akademik, yang dengan mudah dapat diukur untuk dievaluasi secara kuantitatif. Dua kemampuan lain belum dilaksanakan secara eksplisit, sebab terkait dengan pelaksanaan evaluasi yang tidak mudah. Menurut teori ini, mutu sekolah ditentukan oleh tiga variabel, yakni kultur sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. Kultur sekolah merupakan nilai-nilai, kebiasaankebiasaan, upacara-upacara, slogan-slogan, dan berbagai perilaku yang telah lama terbentuk di sekolah dan diteruskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, baik secara sadar maupun tidak. Kultur ini diyakini memengaruhi perilaku seluruh komponen sekolah, yaitu: guru, kepala sekolah, staf administrasi, siswa, dan juga orang tua siswa.

Kultur yang kondusif bagi peningkatan mutu akan mendorong perilaku warga ke arah peningkatan mutu sekolah, sebaliknya kultur yang tidak kondusif akan menghambat upaya menuju peningkatan mutu sekolah. Kultur yang kondusif seperti kultur yang mendorong siapapun warga sekolah malu kalau tidak disiplin, siswa malu kalau tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan sebagainya. Kondisi sebaliknya menunjukkan kultur yang tidak kondusif.

Realitas madrasah/ sekolah adalah kondisi faktual yang ada di sekolah, baik kondisi fisik seperti gedung dan fasilitasnya. Realitas sekolah mempengaruhi mutu sekolah, seperti fasilitas gedung dan peralatan yang baik. Sekolah yang memiliki peraturan yang diterima dan dilaksanakan oleh warga dan memiliki hubungan yang akrab dan harmonis antar warga memiliki dampak atas mutu yang baik bagi sekolah.

Kurikulum sekolah dan proses belajar mengajar (PBM) merupakan variabel ketiga yang mempengaruhi mutu sekolah. Dampak variable kualitas kurikulum dan PBM atas mutu sekolah amat jelas. Bahkan diyakini merupakan variabel yang paling dekat dan paling menentukan mutu lulusan. Kualitas kurikulum dan PBM memiliki hubungan timbale balik dengan realitas sekolah. Di samping itu, kualitas kurikulum dan PBM juga dipengaruhi oleh faktor internal sekolah. Faktor internal adalah aspek kelembagaan dari sekolah, seperti sebagaimana struktur organisasi sekolah, dan sebagainya. Faktor internal sekolah ini juga akan mempengaruhi pandangan dan pengalaman sekolah. Selain itu pandangan dan pengalaman sekolah juga akan dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Madrasah memiliki pandangan bahwa siswa merupakan bahan mentah yang memiliki mutu rendah, guru di sekolah malas-malas, maka masyarakat akan memiliki pandangan yang negatif terhadap sekolah (Zamroni, 2013: 7)

Terdapat tiga strategi yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di madrasah, yaitu : strategi yang menekankan pada hasil (*the output oriented strategy*), strategi yang menekankan pada proses (*the process oriented strategy*), dan strategi komprehensif (*comprehensive strategy*).

a) Strategi yang menekankan pada hasil

Strategi ini bersifat *top down*, hasil yang akan dicapai baik kuantitas maupun kualitas telah ditentukan dari atas; baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten/ kota. Ketrencapaian standar yang telah ditetapkan pemerintah juga akan menetapkan berbagai standar yang lain, seperti standar proses, standar pengelolaan, standar fasilitas, dan standar tenaga pendidik. Standar ini sangat efektif dan efisien karena sasarannya jelas dan umum, sehingga apabila diikuti dengan pedoman, pengendalian, dan koordinasi yang baik serta kebijakan yang memberikan dorongan sekaligus ancaman bagi yang menyimpang.

b) Strategi yang menekankan pada proses

Strategi ini muncul tumbuh berkembang dan digerakkan mulai dari bawah, yakni sekolah sendiri. Pelaksanaan strategi ini sangat ditentukan oleh inisiatif dan kemampuan dari sekolah. Sekolah memiliki peran yang sangat menentukan dan sekaligus pengambil inisiatif, maka akan muncul semangat dan kekuatan dari

sekolah sesuai dengan kondisi masing-masing. Gerakan untuk memperkuat diri dengan bekerja sama di antara sekolah telah lahir, yang diikuti dengan munculnya berbagai inovasi dan kreasi dari bawah.

c) Strategi komprehensif

Strategi ini menggariskan bahwa hasil yang dicapai madrasah/ sekolah ditentukan secara nasional, yang diwujudkan dalam standar nasional. Mencapainya, berbagai standar yang berkaitan dengan hasil juga ditentukan sebagai jaminan hasil akan dicapai. Dibalik berbagai standar yang telah ditentukan, sekolah memiliki kekuasaan dan otoritas yang besar untuk mengelola sekolah dalam mencapai standar hasil tersebut. Berdasarkan strategi ini bisa diperkirakan akan muncul keanekaragaman dalam pengelolaan sekolah.

Dengan demikian, kondisi dan kebutuhan lokal terakomodasi dengan strategi komprehensif ini. Tujuannya bersifat nasional tetapi cara mencapainya sesuai dengan kondisi lokal. Strategi peningkatan mutu sekolah yang ada di Indonesia cenderung pada strategi komprehensif, sebagaimana dapat ditunjukkan dengan adanya berbagai standar nasional yang menjadi acuan sekolah, namun sekolah diberi kebebasan dalam bentuk kebijakan manajemen berbasis sekolah khususnya (Zamroni, 2013: 18)

d. Landasan Kebijakan Peningkatan Mutu Madrasah/ Sekolah

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIV Pengelolaan Pendidikan Pasal 51, sebagai berikut:
 - a) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah;
 - b) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
 - c) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Bab II tentang Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Pasal 3 yaitu Badan Hukum pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VIII tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Pasal 49 yaitu:

- a) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
 - b) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah.

C. Kerangka Berpikir

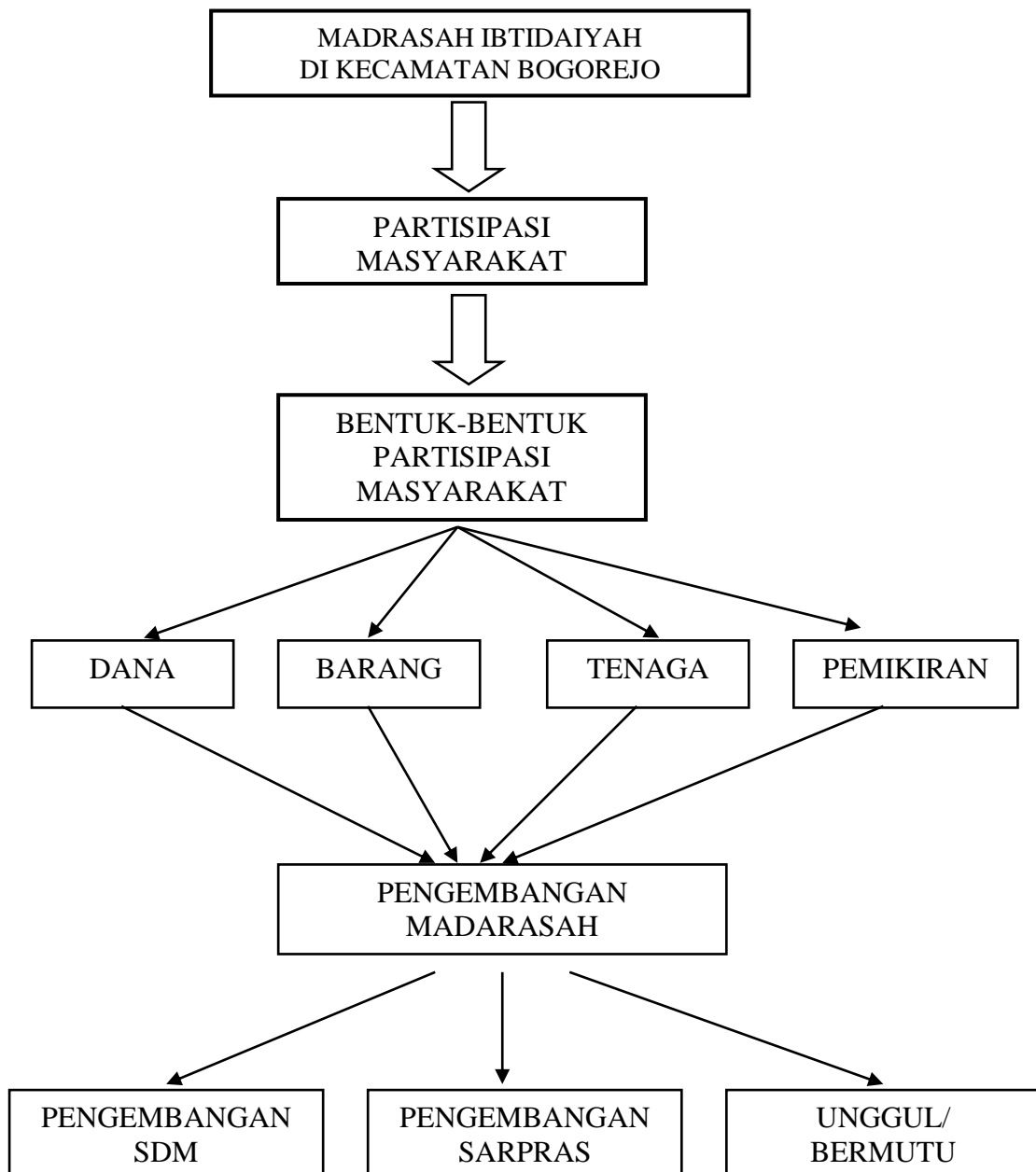
Masyarakat merupakan penentu akan maju atau tidaknya sebuah lembaga pendidikan madrasah. Peran serta atau partisipasi diperlukan untuk memberikan control keberadaan dari sebuah madrasah tersebut. Tentu partisipasi ini bisa berupa pendanaan, sarana prasarana, SDM sehingga diharapkan bisa mewujudkan madrasah yang bermutu.

Mutu sebuah madrasah dapat dilihat dari tertib atau tidaknya administrasinya, seperti adanya mekanisme kerja yang efektif dan efisien. Jika

dilihat dari prespektif operasionalnya, madrasah dikatakan bermutu jika sumber daya manusianya secara bersama-sama bekerja dengan efektif dan efisien. Sarana prasarana untuk menunjang KBM tentu juga menentukan keberhasilan/ kebermutuan madrasah tersebut. Mereka bekerja dikarenakan memiliki rasa tanggungjawab akan tugas pokok dan fungsinya dan sikap mental (mindset) tenaga yang ada di sekolah menjadi syarat utama bagi upaya meningkatkan mutu madrasah.

Untuk dapat melihat dan menggambarkan bagaimana kerangka berpikir serta mengetahui alur pemikiran dalam penelitian ini, maka kerangka berpikir yang mendasari penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 1.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH
DI KEC. BOGOREJO KAB. BLORA



HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora, didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Suasana keterbukaan, saling percaya dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan program serta evaluasi program madrasah yang difasilitasi dan dijembatani oleh madrasah merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora sehingga dapat mewedahi aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menggalang dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.
2. Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangsih pemikiran dengan merencanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan madrasah, merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora.
3. Mutu pendidikan di MI Sirojul Huda dan MI Tarbiyatul Athfal dapat terwujud atas kerja sama yang baik antara pihak sekolah termasuk kepala sekolah dengan komite sekolah dan masyarakat dengan indikasi banyak

torehan prestasi akademik dan non akademik di MI Sirojul Huda dan MI Tarbiyatul Athfal.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara madrasah, masyarakat dan pemerintah.
- b. Masyarakat Kecamatan Bogorejo hendaknya juga mengetahui kebutuhan madrasah dalam peningkatan proses pembelajaran.
- c. Masyarakat Desa Bogorejo maupun Desa Wanutengah hendaknya tidak hanya berpartisipasi dalam kurun waktu yang lama, akan tetapi dilakukan secara periodik atau berkelanjutan. Selain itu bentuk partisipasi masyarakat hendaknya tidak terbatas pada materi, akan tetapi lebih condong kepada pikiran dan tenaga atau jasa.

2. Bagi Madrasah

Kepala Madrasah lebih banyak melibatkan tokoh masyarakat (Ulama/Kyai, tokoh pendidikan) dalam pengelolaan madrasah dan peningkatan kualitas pendidikan dan pihak sekolah mensosialisasikan tentang bantuan pemerintah yang berkaitan dengan dana BOS agar lebih terbuka oleh sekolah dan hendaknya masyarakat menerima keterbukaan dari Madrasah Ibtidaiyah Sirojul Huda dan Madrasah Ibtidaiyah Tarbiayul Athfal Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora serta

meningkatkan kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan masyarakat agar masyarakat terdorong untuk berpartisipasi.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat hidayah dan rahmatnya akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Menyadari atas keterbatasan tersebut, maka penulis mengharap dengan sangat saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H. Moch. Idhoci. *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013.
- Arikunto. Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
_____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Astuti Dwiningrum, Siti Irene. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Chapman And, David Don Adams, *The Quality Of Education: Dimensions And Strategie*, Vol.5, No.3.
- Daniel, Moehar. *PRA Partcipatory Rural Appraisal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.
- Ahmadi, Rulam, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, Malang: UM Press, 2010
- Aisyah, Siti, “*Implementasi Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat di MAN Pangkalan Balai Banyuasin*” Tesis Program PascasarjanaUIN Raden Fatah Palembang: tidak diterbitkan, 2013.
- Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: BumiAksara, 2014, cet. 2
- Depdiknas RI., *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Program Guru Bantu-Direktorat Tenaga Kependidikan, 2013

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011
- Fuad, Nurhattati, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Strategi Implementasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reserch*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011
- Hasibuan, Malayu P., *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Jihad, Nur, “*Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendidikan Islam (Studi Multisitus SMPN 1 Taliwang dan MTsN 1 Taliwang Sumbawa Barat)*” Tesis Program Pascasarjana UIN Malang: tidak diterbitkan, 2010
- Minarti, Sri, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010
- Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Bandung: Departemen Pendidikan Agama RI, 2013
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet. 2
- Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2010
- Ramli, Moh., “*Manajemen Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus MIN Malang I Jl. Bandung)*” Tesis Program Pascasarjana UIN Malang: tidak diterbitkan, 2008
- Rifa’i, Moh., “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus M.A T.M.I Al-Amien Prenduan Sumenep)*” Tesis Program Pascasarjana UIN Malang: tidak diterbitkan, 2008
- Sikula, Andrew F., *Personnel Administration and Human Resources Management*, New York: A. Wiley Trans Ed. By John Wiley & Sons Inc., 1981
- Soekanto, Sarjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Sudijono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta : Rajawali, 2011

-----, *Tehnik Evaluasi Pendidikan Suatu Pengantar*, Yogyakarta:UD.
Rama, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2010 cet. 9

Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

-----, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi
Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH
DAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH DI KECAMATAN BOGOREJO**

1. Bagaimana sejarah berdiri dan perkembangan madrasah?
2. Apa Visi Misi dan tujuan madrasah?
3. Bagaimana keadaan guru, karyawan dan siswa madrasah?
4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana madrasah?
5. Bagaimana upaya anda dalam pengembangan madrasah anda?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan madrasah anda?
7. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah anda?
8. Bagaimana mekanisme yang diberikan madrasah dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat di madrasah anda?
9. Apa saja bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat di sekitar madrasah anda?
10. Bagaimana strategi yang ada diterapkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di madrasah anda?
11. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) madrasah anda? Dalam bentuk apa saja?
12. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana madrasah anda? Dalam bentuk apa saja?
13. Partisipasi apa yang diberikan masyarakat kepada madrasah?
14. Berapa besar wali murid yang hadir di setiap undangan rapat?
15. Setiap kegiatan madrasah seperti pramuka, study tour, PHBI, agustusan, adakah partisipasi dari masyarakat?
16. Pembangunan madrasah mendapat bantuan dari masyarakat baik dari segi tenaga maupun biaya? (iya/tidak) bagaimana pelaksanaannya?
17. Selain partisipasi di atas adakah partisipasi lain yang diberikan masyarakat kepada madrasah?
18. Dalam menanggapi keputusan dari madrasah, bagaimana respon dari masyarakat?
19. Adakah peran dari tokoh masyarakat di lingkungan madrasah baik berupa dana, jasa, tenaga dan pemikiran? dalam hal apa dan bagaimana pelaksanaannya?
20. Bagaimana cara pihak madrasah dalam mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam kegiatan madrasah?
21. Pernahkah berkunjung ke rumah wali murid baik dalam hal menjenguk siswa yang sakit, karena membolos secara terus menerus dan sebagainya?
22. Atau dengan cara mengundang dalam pertemuan rutin untuk membahas masalah tertentu? Bagaimana pelaksanaan partisipasi tersebut?

23. Dilakukan secara langsung tatap muka antara guru dan wali murid atau tidak? Adakah kendala yang dihadapi dalam menjalankan partisipasi itu?
24. Dalam pelaksanaannya apakah ada jadwal tetap dari madrasah?
25. Partisipasi apa yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat terhadap pengembangan madrasah?
26. Kapan masyarakat mulai sadar akan pentingnya partisipasi masyarakat dan mulai memberikan partisipasinya kepada madrasah?
27. Dari mulai partisipasi diberikan sampai sekarang kemajuan apa yang dapat dicapai? Apakah mengalami jumlah peningkatan siswa di setiap tahunnya? Sampai berapa persenkah peningkatan tersebut?
28. Dari segi bangunan adakah kemajuan? di bagian apa!
29. Kualitas pendidikan meningkat atau tidak? jelaskan!
30. Hubungan antara madrasah dengan masyarakat semakin erat atau malah berkurang? Jelaskan peningkatannya!
31. Adakah kendala yang dialami oleh pihak madrasah dalam menanggapi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat? dan bagaimana solusinya?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KOMITE MADRASAH
IBTIDAIYAH
DI KECAMATAN BOGOREJO**

1. Dalam kaitannya dengan peran, apakah komite madrasah ikut berperan dalam pengembangan madrasah? Peran apa yang diberikan kepada pihak madrasah?
2. Apakah dalam setiap pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan madrasah dilakukan atas persetujuan dari komite madrasah?
3. Bagaimana jika terjadi tidak keselarasan antara komite dengan pihak madrasah?
4. Peran apa yang banyak dilakukan oleh komite kepada madrasah?
5. Dalam kaitan peran komite madrasah sebagai penghubung antara madrasah
6. dengan masyarakat (wali murid), sudahkah dilakukan? Bagaimana pelaksanaan peran tersebut?
7. Adakah masyarakat yang memberikan partisipasinya melalui komite madrasah?
8. Bagaimana tanggapan komite madrasah terhadap pemberian partisipasi tersebut?
9. Bagaimana cara komite madrasah dalam menyalurkan partisipasi tersebut kepada madrasah?
10. Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut?
11. Kendala internal/eksternal? Bagaimana cara untuk menyelesaikannya?
12. Kemajuan apa yang dapat dilihat di madrasah berkaitan dengan adanya partisipasi dari masyarakat?
13. Harapan apa yang diinginkan dari komite madrasah terhadap partisipasi dari masyarakat tersebut?
14. Dari setiap tahunnya apakah partisipasi masyarakat mengalami kestabilan atau tidak?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT
DI SEKITAR MADRASAH IBTIDAIYAH KECAMATAN BOGOREJO**

1. Sejauh mana pengertian anda tentang pentingnya pendidikan untuk anak anda?
2. Upaya apa yang anda lakukan demi kemajuan pada anak anda di bidang pendidikan khususnya?
3. Apa yang anda harapkan dari anak anda dengan menyekolahkan anda di madrasah tersebut?
4. Bagaimana partisipasi anda kepada madrasah tersebut, agar madrasah tersebut bisa mengalami kemajuan?
5. Apakah anda pernah membantu kegiatan di madrasah? Kegiatan apa yang anda ikuti?
6. Adakah kegiatan yang wajib dari madrasah bagi wali murid?
7. Pernahkah anda memberikan bantuan kepada madrasah secara sukarela? Bantuan untuk kegiatan apa?
8. Adakah dari masyarakat desa yang tidak mempunyai anak di madrasah tersebut yang ikut berperan? Apa pendidikan mereka?
9. Pernahkan anda memberikan masukan berupa ide kepada pihak madrasah?
10. Dalam hal apa, dan bagaimana tanggapan dari pihak madrasah?
11. Faktor apa yang membuat anda berkeinginan pengembangan madrasah?
12. Menurut anda apakah madrasah tersebut mengalami kemajuan?
13. Adakah tokoh masyarakat yang ikut berupaya dalam pengembangan madrasah? Bagaimana bentuk upaya tersebut?
14. Pengembangan madrasah yang seperti apa yang anda harapkan dari madrasah tersebut?
15. Bagaimana bentuk dari partisipasi dalam pengembangan madrasah tersebut?
16. Apakah anda sering mendatangi undangan rapat dari madrasah? Membahas apa dan kapan pelaksanaannya?
17. Selain kehadiran rapat, apakah anda pernah datang ke madrasah? Untuk kepentingan apa?
18. Jika terjadi masalah pada anak anda apakah anda pernah berkonsultasi kepada guru? Apa masalahnya? dan Bagaimana saran yang diperoleh?
19. Dari segi biaya apakah wali murid pernah dimintai bantuan, bagaimana anda menanggapinya?
20. Selain bantuan dana, pernahkan anda memberikan bantuan tenaga kepada madrasah? Kapan dan bagaimana pelaksanaannya?
21. Dalam kegiatan madrasah seperti pramuka/tujuh belasan pernahkah anda membantu? Bagaimana bentuk bantuan yang anda berikan?

22. Selain beberapa peran yang tadi saya tanyakan adakah partisipasi lain yang anda berikan kepada madrasah? Misalnya dalam pengembangan sumber daya manusia, pernahkah anda berperan menjadi pengajar/ guru pengganti seperti dalam kegiatan keagamaan, kesehatan dan sebagainya? Kapan pelaksanaannya dan materi apa yang diberikan?
23. Selain peran berupa pemikiran, barang dan jasa, apakah anda sudah memberikan peran moral berupa pendidikan kepada anak ketika di rumah?
24. Bagaimana cara anda sebagai wali murid dalam menerima setiap keputusan yang diberikan madrasah kepada siswanya?
25. Apakah anda pernah mengkritik pihak sekolah ketika terjadi suatu ketidak tepatan terhadap pelaksanaan pendidikan di madrasah?
26. Pernahkan anda memberikan peran berupa menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan di madrasah?
27. Melalui siapa partisipasi tersebut diberikan jika berupa dana kepada kepala madrasah, komite atau dengan guru yang ada di madrasah?
28. Apakah ada jadwal tetap untuk pelaksanaan peran tersebut dari madrasah? Jika iya, partisipasi yang seperti apa?
29. Bagaimana respon dari madrasah berkaitan dengan adanya partisipasi dari masyarakat?
30. Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi tersebut dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya?